

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Ratnasari (2013) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa salah satu pihak (prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan mendelegasikan otoritas kepadanya. Pendelegasian otoritas memang menjadi sebuah keharusan dalam hubungan keagenan ini untuk memungkinkan agen mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada prinsipal.

Dalam setiap hubungan keagenan, timbul *agency cost* yang ditanggung baik oleh prinsipal maupun oleh agen. Maka dari itu setiap perusahaan perlu menerapkan konsep *corporate governance* agar diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham) dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimalisasi biaya keagenan serta mencegah adanya konflik kepentingan.

Para manajer mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam manajemen keuangan, hubungan keagenan utama terjadi di antara (1) pemegang saham dan manajer dan (2) manajer dan pemilik utang (Brigham dan Houston, 2011).

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agent. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Pihak *Principal* dianggap hanya mementingkan hasil keuntungannya saja, sedangkan pihak agen dianggap mementingkan bonus atau kompensasi dari pihak *principal*. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Kurniasih, 2013).

Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidak seimbangan informasi karena agen mempunyai posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan prinsipal. Informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Asimetri antara agen dengan prinsipal memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik atau memperoleh keuntungan pribadi. Dengan asumsi bahwa individu-individu agen bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk melakukan manajemen laba sehingga kinerjanya akan nampak lebih baik (Verawati, 2012).

2.2 Kualitas Laba

Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokkan apakah laba yang dihasilkan sama dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kualitas laba semakin tinggi jika mendekati pendekatan awal atau lebih melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah jika dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan laba sebelumnya sehingga informasi yang didapat dari laporan laba

menjadi bias dan dampaknya menyesatkan kreditor dan investor dalam mengambil keputusan (Paulus 2012). Penilaian sejauh mana laba sebuah perusahaan itu dapat diperoleh berulang, dapat dikendalikan diantara faktor-faktor lainnya. Kualitas laba mengakui fakta bahwa dampak ekonomi transaksi yang terjadi akan beragam diantara perusahaan sebagai fungsi dari karakter dasar bisnis mereka, dan secara beragam dirumuskan sebagai tingkat laba yang menunjukkan apakah dampak ekonomi fokusnya lebih baik dalam memperkirakan arus kas atau juga dapat diramalkan. Mengelompokkan konstruk kualitas laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas laba, yaitu berdasarkan: sifat runtun-waktu dari laba, karakteristik kualitatif dalam kerangka konseptual, hubungan laba-kas-akrual, dan keputusan implementasi. Kualitas laba merupakan indikator atas reliabilitas dan relevansi laba terhadap keputusan yang akan diambil (Hidayanti 2013).

Kualitas laba pada dasarnya sebuah konseptoritis, dan dari peneliti belum mengidentifikasi metode yang seragam untuk mengukur multidimensi ini. Meskipun kualitas laba dibahas dalam literature dengan mengacu pada yang disebutkan di atas beberapa dimensi, peneliti empiris biasanya diukur hanya satu atau dua dimensi dalam studi tertentu. Ketika kita menilai kualitas laba dengan memeriksa satu, atau satu partikel kecil, dimensi dan mengabaikan dimensi yang tersisa, kita mungkin membuat kesimpulan yang keliru tentang kualitas laba dari suatu perusahaan.

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Rahmah(2015) menspesifikasikan kualitas laba sebagai informasi akuntansi dari sudut pandang pengguna dalam mengambil keputusan. Menurut kerangka konseptual FASB, kegunaan keputusan informasi keuangan secara utama tergantung pada kerelevasian, dapat dipahami dan kehandalan atas informasi laporan tersebut. Kualitas laba sebagai sejauhmana dilaporkan laba yang terintegritas dapat mewakili pendapatan, dimana integritas representasional dapat diartikan sebagai korespondensi atau kesepakatan antara ukuran pada deskripsi dan fenomena yang

dimaksud. Pentingnya kualitas laba dapat dijelaskan dalam tiga perspektif, yaitu: perspektif investasi, informasi perspektif pengguna laporan keuangan, dan akuntansi standar perspektif pengaturan. Menyatakan bahwa korelevansi laporan keuangan merupakan salah satu proksi dari kualitas laba.

Terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan dalam pengukuran kualitas laba antara lain persentasi laba, *Discretionary Accruals*, ketepatan waktu, dan *Earnings Respons Coefficients*. Kualitas laba yang digunakan ini didasarkan pada hubungan laba- kas- akrual. Kualitas laba yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengukuran kualitas akrual informasi laba yang dihasilkan perusahaan diukur dengan ada/ tidaknya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen yang dihitung dengan *Discretionary Accruals*. Dengan menggunakan *Discretionary Accruals*, laba yang berkualitas yang memiliki *Discretionary Accruals* yang kecil. Jika *Discretionary Accruals* perusahaan semakin kecil, maka kualitas laba perusahaan semakin tinggi begitu sebaliknya (Gunawan 2017).

2.3 Corporate Governance

Good Corporate Governance yaitu seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dalam mengendalikan sistem perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Proses *Corporate Governance* artinya cara atau langkah perusahaan dalam menerapkan peraturan-peraturan *good corporate governance* yang ada sehingga tercapai tujuan dari *good corporate governance* tersebut. Untuk menerapkan peraturan dan mencapai tujuan *good corporate governance* tersebut maka perusahaan berpatokan pada prinsip *good corporate governance* itu sendiri dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Prinsip tersebut mencakup *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Dengan kata lain

proses *good corporate governance* merupakan proses penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* dalam kegiatan perusahaan (Gunawan 2017).

2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari CG yang baik, mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan pemegang saham sebagai pemilik. Manajemen yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial merupakan persentasi kepemilikan saham perusahaan atau manajemen oleh direktur perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Rahmawati, 2015).

Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Yang biasanya dinyatakan sebagai persentasi saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, komisaris dan direksi.

2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusional yang dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki institusi dalam perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi kualitas laba. Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mengurangi penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Suyanti, 2010).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi pelaku *opportunistik* manajer. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan kecurangan yang dilakukan manajemen.. Selain itu (Rahmawati 2015) mendefinisikan Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri dan perwakilan serta instansi lainnya.

2.6 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ Emiten atau perusahaan public yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi (Gunawan 2017). Sedangkan menurut (Amsyari,2013) Dewan komisaris merupakan dewan yang dibentuk oleh *shareholders* dan menjadi wakil *shareholders* dalam jajaran manajemen perusahaan sebagai pengawas oprasional. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan yang diambil manajemen. Hal ini berarti dewan komisaris juga dapat memiliki peran dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban social perusahaan.

Dewan komisaris sebagai wakil dari *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum atau perseroan terbatas yang memiliki fungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen sudah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial karena dewan komisaris merupakan wakil dari prinsipal yang menjadi pelaksana tertinggi di perusahaan (Fahrizqi, 2010 dalam Laksmitaningrum ,2013).

Teori agensi telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang dewan komisaris karena perusahaan yang memiliki manajemen dengan tugas yang besar akan membutuhkan dewan komisaris yang lebih banyak untuk mengawasi kegiatan manajemen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris yang berperan sebagai pihak intern yang mengawasi manajemen akan memberikan tekanan yang semakin besar dalam melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin besar tekanan untuk kegiatan sosial, maka semakin luas pengungkapannya (Ale,2014).

2.7 Komite Audit

(Yuniarti, 2014) Komite audit merupakan topik yang signifikan dalam literatur akuntansi tahun-tahun akhir ini. Hal ini penting karena adanya pengawasan secara profesional yang dapat dipercaya realibilitasnya dalam menjamin pengkapan laporan – laporan keuangan yang akan meningkatkan *value* perusahaan dan kredibilitas perusahaan dimata investor. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dengan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* diperusahaan-perusahaan (Effendi, 2016 : 25).

Komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengawasi system pengendalian internal. Komite audit diharapkan dapat mengurangi aktivitas manajemen laba yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas laba.

2.8 Dewan Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara legal dalam mengelola perusahaan. Dalam penelitian ini dewan direksi diproksikan dengan ukuran dewan direksi yang diukur dengan menggunakan indikator jumlah seluruh anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan (Sukandar, 2014).

Direksi yaitu seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi dapat dimiliki seseorang yang memiliki perusahaan atau profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara (Zarkasyi, 2008).

2.9 Nilai Perusahaan

Yuniarti (2014) mendefinisikan nilai perusahaan yaitu suatu persepsi investor terhadap nilai perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Sedangkan menurut (Adah, 2015) juga mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Apabila harga saham meningkat, maka nilai perusahaan akan meningkat dan diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi harga kemakmuran harga pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umungnya para investor menyerahkan pengelolaannya kepada profesional.

Para profesional tersebut diposisikan sebagai manajer ataupun dewan komisaris. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diproksi dengan *PricetoBook Value* (PBV). *Price to Book Value* (PBV) merupakan rasio pasar yang digunakan

untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Brigham dan Houston (2011), *Price to Book Value* (PBV) merupakan hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku saham. Nilai buku (*Book Value*) dapat dirumuskan sebagai berikut Putra (2013). *Price to Book Value* digunakan sebagai proksi karena keberadaan PBV sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan kualitas laba serta nilai perusahaan telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu di Indonesia

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1	Boediono(2005)	Kualitas Laba Studi Pengaruh <i>Mekanisme Corporate Governance</i> dan Dampak Manajemen Laba dengan Analisis Jalur.	Mekanisme <i>corporate governance</i> dan manajemen laba secara bersama – sama berpengaruh kualitas laba selain itu mekanisme <i>corporate governance</i> dan manajemen laba secara individual kurang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba.
2	Siallagan dan Machfoezd (2006)	<i>Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan</i>	Kualitas laba merupakan variabel mediasi antara <i>Corporate Governancedan</i> nilai perusahaan. Didapatkan

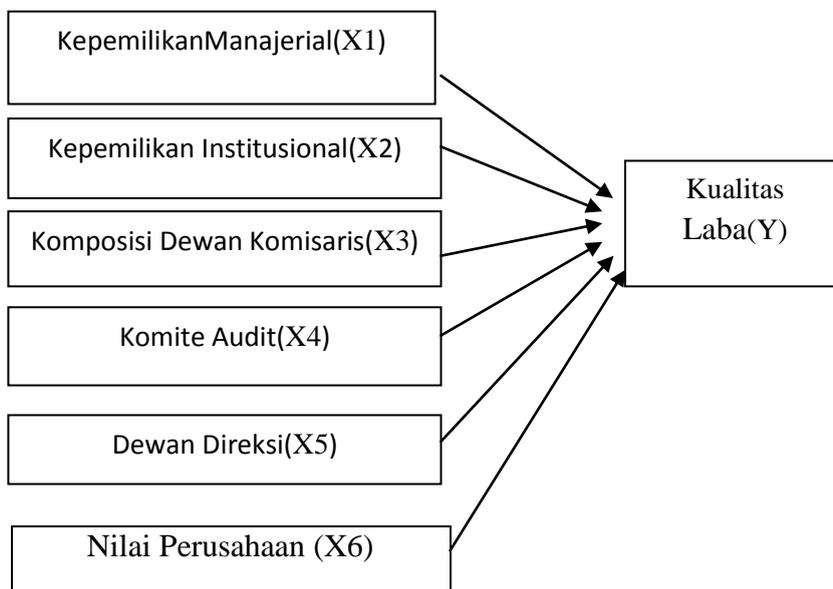
			<p>hasil bahwa <i>Corporate Governance</i> mempengaruhi kualitas laba. Dimana kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh secara positif sedangkan dewan komisaris berpengaruh negative terhadap kualitas laba.</p>
3	Rachmawati dan Triatmoko (2007)	<p><i>Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan</i></p>	<p>Hasil penelitian ini adalah IOS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. Sedangkan komite audit dan dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan.</p>
4	Herawaty (2008)	<p><i>Peran Praktek</i></p>	<p>Pengaruh praktek <i>corporate</i></p>

		<p><i>Governance</i></p> <p><i>Moderating Variabel</i></p> <p><i>dari Pengaruh</i></p> <p><i>Management dari</i></p> <p><i>Nilai Perusahaan.</i></p>	<p><i>governance</i> terhadap hubungan antara <i>earnings management</i> terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa <i>corporate governance</i> secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negative, Sedangkan kualitas laba berpengaruh secara positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>
5	Anisa Larasatii (2009)	<p><i>Analisi Pengaruh</i></p> <p><i>Mekanisme Corporate</i></p> <p><i>Governance Nilai</i></p> <p><i>Perusahaan dan</i></p> <p><i>Kualitas Laba</i></p>	<p>Hasil Penelitian Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Nilai Perusahaan dan Kualitas Laba. Dimana kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba.</p>

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian bertujuan agar lebih memahami penelitian dan arah dari hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan gambaran tentang variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi dan Nilai Perusahaan

Gambar 1.2
Kerangka pemikiran



2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kualitas Laba

Menurut *agency theory*, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan disebabkan prinsipal dan agen mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Menurut Amelia (2016), perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mengakibatkan manajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan

pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan saham.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan seperlunya mengingat kepemilikan dimiliki oleh pihak *insider* yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai perusahaan tanpa adanya pengungkapan dalam laporan tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fardilah, 2015) mengenai pengaruh antara kepemilikan manajemen terhadap kualitas laba perusahaan diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.12.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kualitas Laba

Tingginya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat penyelewengan- penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, para pemilik institusional cenderung akan berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga peningkatan kepemilikan oleh institusi akan berdampak pada kualitas laba. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan saham institusional sebagai mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan laba kurang memberikan pengaruh kepada pasar melalui informasi laba (Adah, 2015).

Dalam penelitian Wilsna (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini sesuai dengan teori bahwa investor institusional tidak berorientasi pada laba sekarang. Investor institusional lebih

mementingkan kinerja perusahaan jangka panjang sehingga kepemilikan saham oleh institusi dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.12.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laba

Latar belakang yang dimiliki oleh seorang dewan komisaris pada suatu perusahaan, dimana latar belakang pendidikan tersebut menjadi tolak ukur perusahaan untuk menentukan baik tidaknya dalam mengelola suatu perusahaan (Pahlevi, 2012). Latar belakang dewan komisaris dinilai mempengaruhi kualitas laba.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Khoirulnisak, 2015).

Putra (2013) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Jika semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berkaitan dengan teori *agency*, dengan melaporkan laporan keuangan yang lebih lengkap maka setidaknya manajemen dapat mengurangi masalah keagenan yang rawan muncul dalam hubungan manajer – pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris yang berperan sebagai pihak intern yang mengawasi manajemen dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan kualitas laba. Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Paulus (2012) menemukan bahwadewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas laba,maka hipotesis yang dilakukan oleh penguji adalah :

H3: Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.12.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dengan komisaris(dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* diperusahaan-perusahaan (Effendi, 2009 : 25).

Topik yang signifikan dalam literatur akuntansi tahun-tahun akhir ini. Hal ini penting karena adanya pengawasan secara profesional yang dapat dipercaya realibilitasnya dalam menjamin pengkapan laporan-laporan keuangan yang akan meningkatkan *value* perusahaan dan kredibilitas perusahaan dimata investor (Yuniarti, 2014). Hal ini penting karena adanya pengawasan secara profesional yang dapat dipercaya reliabilitasnya dalam menjamin pengungkapan laporan-laporan keuangan yang akan meningkatkan *value* perusahaan dan kredibilitas perusahaan di mata investor. Adanya Komite Audit saat ini diterima sebagai bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance* yang baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Siallagan & Machfoedz (2006) dan Wilsna (2011) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laba. Hasil penelitian tersebut

memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen cenderung melaporkan laba dengan kandungan *discretionary accruals* yang lebih rendah dari pada perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Kandungan *discretionary accruals* akan mempengaruhi Kualitas Laba perusahaan. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komite Audit Berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.12.5 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kualitas Laba

Dewan Direksi adalah organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara legal dalam mengelola perusahaan. dalam penelitian ini dewan direksi diprosikan dengan ukuran dewan direksi yang diukur dengan menggunakan indikator jumlah seluruh anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan (Sukandar, 2014). Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi dapat dimiliki seseorang yang memiliki perusahaan atau profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara (Zarkasyi, 2008). sistem manajemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance* untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil penelitian Ardiansyah (2014) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini memiliki makna, semakin banyak dewan direksi maka akan meningkatkan fungsi monitoring terhadap laba sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Dewan Direksi Berpengaruh terhadap kualitas laba.

2.12.6 Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Kualitas Laba

Perusahaan yang berukuran besar juga dapat mempengaruhi respon pasar dan biasanya lebih diperhatikan oleh masyarakat, sehingga mereka harus lebih berhati-hati dalam melaporkan informasi laba pada laporan keuangan, dan dapat memberikan dampak perusahaan tersebut harus melaporkan kondisi kinerja keuangannya yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang

terkandung dalam laporan keuangannya lebih transparan, sehingga lebih sedikit untuk melakukan praktik kualitas laba dan perusahaan memiliki informasi laba yang berkualitas (Putra, 2013). Hasil penelitian (Hamidy, 2014) menyatakan nilai perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Nilai Perusahaan Berpengaruh terhadap kualitas laba.